

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Myanmar merupakan negara yang kaya akan keberagaman etnis serta agama. Myanmar memiliki 135 etnis. Etnis yang paling dominan di Myanmar adalah Bamar, Shan, Kayni, Rakhine, Chinese, Mon, dan Kachin (www.oxfordburmaalliance.org, 2009). Budha adalah agama nasional di Myanmar (<http://in.reuters.com>, 2013). Etnis Rohingya adalah salah satu etnis yang tinggal di Myanmar beragama Islam, namun mereka tidak diakui sebagai warga negara dan mengalami diskriminasi oleh pemerintah Myanmar.

Etnis Rohingya tinggal di wilayah Arakan yang juga dihuni oleh etnis Rakhine, tetapi hubungan antara keduanya tidak harmonis. Pada Mei 2012, terjadi konflik antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine. Konflik tersebut bermula ketika beredar foto hasil forensik mengenai pembunuhan terhadap perempuan etnis Rakhine bernama Ma Thaida Htwe yang terjadi pada 28 Mei 2012 yang dilakukan oleh tiga pemuda etnis Rohingya (www.internasional.kompas.com). Para Bisku dan masyarakat etnis Rakhine berdemonstrasi “No Rohingya”, membunuh etnis Rohingya, merusak bangunan ibadah, dan merusak tempat tinggal. Konflik tersebut mengakibatkan lebih dari 70 orang meninggal, lebih dari 3.000 bangunan rusak, dan hampir 60.000 orang kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi ke Malaysia, Thailand, dan Indonesia (www.rohingya.org)

Akibat dari konflik tersebut, etnis Rohingya berusaha melarikan diri dan berbondong-bondong pergi dari rumah mereka di Myanmar guna menghindari diskriminasi dan penganiayaan yang dilakukan oleh pemerintah dan kelompok garis keras Buddha di Myanmar. Etnis Rohingya dihadapkan dengan terbatasnya akses dalam mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan untuk bepergian atau melaksanakan kegiatan agama mereka sendiri dianggap menjadi alasan

mereka pergi dari Myanmar. Beberapa melarikan diri dari kondisi buruk tersebut, tapi dalam beberapa kasus, ada oknum penyelundup yang memikat dan menipu pengungsi untuk diajak pergi dari Myanmar melalui jalur laut tanpa mengungkapkan apa yang sebenarnya, dan akhirnya mereka menjerumuskan pengungsi ke dalam perdagangan manusia. Mereka harus membayar untuk mendapat tempat di atas kapal. Setelah itu, para awak kapal meninggalkan mereka di laut hanya dengan sedikit atau tanpa makanan dan minuman sama sekali.

Sekitar 25.000 orang Rohingya melakukan pelayaran dengan perahu ke negara-negara tetangga Myanmar. Pada tahun 2015, beberapa ribu masih berada di laut setelah berulang kali ditolak oleh angkatan laut dari Indonesia, Thailand dan Malaysia. Umumnya mereka berlayar dengan perahu kecil melalui Laut Andaman, India, untuk mencari suaka di negara yang bersedia menerima mereka. Para pengungsi Rohingya bertahan dua bulan di laut, berada di bawah dek yang sempit dengan makanan, air dan sanitasi sangat terbatas. Kapal membawa sekitar 100 orang, kebanyakan laki-laki dan perempuan. Lalu, mereka diturunkan di sebuah lokasi di sepanjang pantai Thailand, mereka akan berjuang sendiri sampai mereka ditemukan oleh otoritas Thailand.

Menurut PBB, pada bulan Mei 2015 ada 3.000 hingga 4.000 orang masih berada di atas kapal di laut. Ketika kapal yang membawa ribuan pencari suaka etnis Rohingya dan pendatang dari Myanmar tiba di Thailand, Malaysia, dan Indonesia, pemerintah negara tersebut memberikan respon negatif dengan menolak kedatangan mereka dan menarik kapal mereka kembali ke tengah laut. Hal tersebut menimbulkan kecaman internasional dan memaksa mereka untuk mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut.

Menanggapi tekanan tersebut, menteri luar negeri dari ketiga negara bertemu di Kuala Lumpur pada 21 Mei 2015. Hasilnya, Malaysia dan Indonesia sepakat untuk mengizinkan kapal orang Rohingya mendarat di negaranya dan bersedia menampung pengungsi Rohingya, tetapi hanya dengan syarat bahwa masyarakat internasional memberikan bantuan kemanusiaan dan membantu memukimkan kembali atau memulangkan semua penumpang dalam waktu satu

tahun. Lebih lanjut, Indonesia dan Malaysia menyatakan akan menjamin nasib lebih dari 7.000 orang yang masih terkatung-katung di sekitar Selat Malaka. Menteri Luar Negeri Malaysia, Anifah Aman menyatakan bahwa Malaysia hanya akan menerima pengungsi yang saat itu ada di tengah laut, dan tidak berniat menerima pengungsi baru dari Myanmar. Ratusan pengungsi juga diselamatkan oleh nelayan Aceh dari kapal yang terancam karam di lepas pantai Aceh. Menurut keterangan pejabat dan nelayan lokal, ada 433 orang yang dibawa ke tempat-tempat penampungan di Aceh Timur.

Konflik yang semakin memanas di Rakhine State tersebut kini sudah menjadi ancaman internasional, juga menjadi tanggungjawab bersama untuk diselesaikan, khususnya bagi Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Menyikapi situasi yang memanas di Rakhine State, Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah guna mendorong Pemerintah Myanmar untuk segera memulihkan keamanan dan stabilitas di Rakhine State. Melalui pernyataan tertulis yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri RI, tanggal 29 Agustus 2017, Pemerintah meminta agar semua pihak di Rakhine State menghentikan aksi kekerasan, memberikan perlindungan keamanan secara inklusif, memulihkan keamanan serta menghormati hak asasi manusia masyarakat di Rakhine State termasuk masyarakat Muslim.

Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri terus melakukan komunikasi dengan *National Security Advisor* Myanmar Amb. U Thaung Tun, Menlu Bangladesh Mahmood Ali, dan mantan Sekjen PBB, Kofi Annan, yang Menjadi Ketua *Advisory Commission* on Rakhine State. Komunikasi dan koordinasi tersebut bertujuan untuk mengetahui situasi di lapangan dan upaya yang dapat dilakukan untuk tangani bantuan kemanusiaan.

Sebagai tindak lanjut dari rencana program bantuan Indonesia ke Myanmar dan situasi di lapangan, pada tanggal 31 Agustus 2017, Retno meluncurkan Program *Humanitarian Assistance for Sustainable Community* (HASCO) untuk Myanmar. Program tersebut merupakan komitmen dari 11 (sebelas) LSM tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar

(AKIM). Program bertujuan untuk memberikan bantuan jangka menengah dan panjang bagi rakyat Myanmar secara inklusif, khususnya di Rakhine State, dalam 4 jenis program yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pembangunan kapasitas, senilai US\$ 2 juta yang dananya merupakan donasi masyarakat Indonesia.

Mesin diplomasi Indonesia terus bergerak optimal agar dapat membantu atasi krisis kemanusiaan ini. Retno Marsudi aktif melakukan komunikasi dengan Sekjen PBB, Antonio Guterres, untuk membahas situasi di Rakhine pada tanggal 1 September 2017. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah pentingnya untuk segera mengatasi situasi kemanusiaan saat ini di Rakhine State dan seruan agar semua bentuk kekerasan harus dihentikan serta proteksi yang harus diberikan kepada semua umat. Peran Indonesia sendiri telah mendapat apresiasi dari Sekjen PBB dan sangat mengharapkan Indonesia lanjutkan perannya dalam membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine State.

Pada tingkat nasional, guna mendapatkan pandangan dan masukan terkait situasi di Rakhine State dari tokoh-tokoh Islam di Indonesia, Retno Marsudi dan Wakil Menteri Luar Negeri RI telah melakukan pertemuan dengan wakil-wakil dari MUI, PBNU, Muhammadiyah dan KAHMI pada tanggal 2 September 2017. Dalam pertemuan tersebut, Retno Marsudi menyampaikan perkembangan di Rakhine State dan langkah cepat yang telah dilakukan pemerintah untuk tanggap situasi di Rakhine State. Beberapa poin yang menjadi perhatian bersama antara lain, pentingnya Myanmar segera mengembalikan keamanan di daerah Rakhine State dan menghormati hak-hak masyarakat termasuk penduduk yang beragama Islam. Para tokoh Agama juga menekankan pentingnya untuk segera menghentikan segala bentuk tindak kekerasan terhadap penduduk dan umat Islam di Rakhine State serta melindungi seluruh penduduk yang ada di Myanmar. Selain itu, Retno Marsudi dan para tokoh Islam juga menekankan pentingnya agar akses kepada lembaga kemanusiaan internasional dan lembaga kemanusiaan dari Indonesia dapat segera terlaksana.

Retno Marsudi akhirnya melakukan pertemuan dengan *State Counsellor*/Menlu Daw Aung San Suu Kyi untuk membahas mengenai permasalahan yang terjadi, dan setelah melakukan pertemuan. Dalam pertemuan, Retno Marsudi menyampaikan usulan Indonesia yang disebut Formula 4+1 untuk Rakhine State. Empat elemen ini terdiri dari:

- i. Mengembalikan stabilitas dan keamanan;
- ii. Menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan;
- iii. Perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama; dan
- iv. Pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.

Diplomasi yang dilakukan oleh Retno Marsudi kepada Aung San Suu Kyi ini pun menyita banyak perhatian publik internasional, bukan hanya karena keberhasilan diplomasi yang dilakukan Retno Marsudi kepada Aung San Suu Kyi, namun juga karena kedua aktor yang memerankan keberhasilan diplomasi adalah sama-sama seorang perempuan yang menjabat jabatan sentral di negaranya.

Empat elemen kebijakan inilah yang nantinya akan penulis bahas dalam skripsi ini, yang juga akan ditinjau dari sudut pandang feminisme. Di dalam skripsi ini juga nantinya diharapkan dapat disampaikan mengenai korelasi antara diplomasi yang dilakukan oleh Retno Marsudi kepada Aung San Suu Kyi dengan argumentasi feminisme liberal, yakni dengan diintegrasikannya perempuan ke dalam kebijakan luar negeri, maka akan lebih baik nantinya dalam mencapai tujuan yang dicanangkan.

I.2 Rumusan Masalah

“Bagaimana analisis implementasi diplomasi Indonesia – Myanmar terkait konflik Rohingya dilihat dari sudut pandang perspektif feminisme?”

I.3 Tujuan Penelitian

Untuk memahami bagaimana sudut pandang feminisme meninjau implementasi diplomasi Indonesia – Myanmar terkait konflik Rohingya.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis adalah untuk memberikan informasi dan data di dalam jurusan hubungan internasional terkait tinjauan sudut pandang feminisme terhadap implementasi diplomasi Indonesia – Myanmar terkait konflik Rohingya.
2. Manfaat Praktis adalah dapat mengetahui dan menjelaskan bagaimana sudut pandang feminisme meninjau implementasi diplomasi Indonesia – Myanmar terkait konflik Rohingya.

I.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pembahasan dari literatur-literatur yang memiliki kaitan dengan topik penelitian yang mana dapat menjadi pembeda antara penelitian ini dengan literatur-literatur yang dipilih , terdapat juga kerangka teori yang digunakan dalam penelitian, alur pemikiran dan asumsi terkait dengan hasil penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang mana berupa pendekatan penelitian, jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV : SEJARAH KONFLIK ROHINGYA

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai sejarah awal terjadinya konflik Rohingya sehingga menyebabkan isu ini menjadi ancaman internasional, juga menjadi ancaman bagi Indonesia

BAB V : ANALISIS IMPLEMENTASI DIPLOMASI INDONESIA – MYANMAR DALAM KONFLIK ROHINGYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF FEMINISME

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai tinjauan sudut pandang feminisme terhadap implementasi diplomasi Indonesia dengan Myanmar terkait konflik Rohingya.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan atas penelitian dan saran atau rekomendasi terhadap permasalahan

